

**PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO
KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Oleh:

**RIFKI MANGGE
NIM: S.2119018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh:

RIFKI MANGGE

NIM: S2119018

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

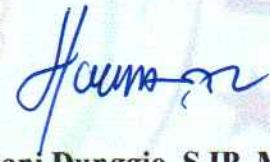
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

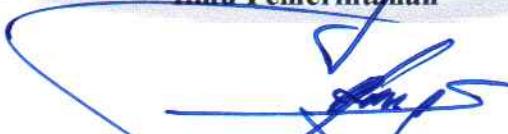
Pembimbing II



Swastiani Dunggio, S.I.P., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN : 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh:

RIEKI MANGGE

NIM-S2119018

SKRIPSI

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui
oleh tim pengujii Pada Tanggal 23 Oktober 2023

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, S.I.P.,S.E.,S.Psi.,MM
 2. Purwanto, S.I.P.,M.Si
 3. Hasan, S.E.,M.Si
 4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
 5. Swastiani Dunggio, S.I.P.,M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Mangge
N i m : S2119018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul : **Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**
2. adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



RIFKI MANGGE

ABSTRACT

RIFKI MANGGE. S2119018. THE EFFECT OF THE VILLAGE FUND USE ON THE COMMUNITY EMPOWERMENT AT BUSATO VILLAGE, PINOGALUMAN SUBDISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims to find the effect of the village fund use on the community empowerment at Busato Village, Pinogaluman Subdistrict, North Bolaang Mongondow District. It employs a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study covers 39 people with a data analysis technique using simple regression analysis. The results indicate that the village fund use contributes to the community empowerment at Busato Village, Pinogaluman Subdistrict by 0.543 or 54.3% with a Fairly Strong category. It shows that the Busato Village government is still more focused on the physical development activities than the community empowerment.

Keywords: *village fund use, community empowerment*

ABSTRAK

RIFKI MANGGE. S2119018. PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 39 orang, dengan teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman sebesar 0,543 atau 54,3%, dan termasuk kategori cukup kuat. Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Busato masih lebih fokus pada kegiatan pembangunan fisik dibanding kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pemanfaatan dana desa, pemberdayaan masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**”.

Dalam penulisan Skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang ditemui, namun berkat dorongan semangat dari orang tua dan keluarga, dan arahan dari pembimbing, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis berikan kepada orang tua, ayahanda Abdul Jabar Mangge dan ibunda Jaura Thalib, yang telah memberikan dorongan dan dukungan, baik materi maupun semangat belajar kepada saya.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengkhususkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

- a) Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua yayasan Universitas Ichsan Gorontalo;
- b) Bapak Dr. Abdul Gaffar La Cokke, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- c) Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan koreksi perbaikan.
- d) Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo

- e) Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan selaku pembimbing II yang banyak memberi masukan perbaikan;
- f) dan Bapak dan ibu dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya selama kuliah.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa isi Skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan saya sendiri. Olehnya itu saran perbaikan sangat diharapkan dari bapak ibu tim penguji. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang sempat membacanya. Amin.

Gorontalo, Oktober 2023
Penulis

Rifki Mangge

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRAC</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dana desa	8
2.2 Pemanfaatan dana desa.....	10
2.3 Konsep pemberdayaan masyarakat	13
2.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat	18
2.5 Tujuan pemberdayaan.....	21
2.6 Tahapan pemberdayaan.....	23
2.7 Kerangka konseptual.....	25
2.8 Hipotesis.....	27

BAB OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	28
3.2 Desain penelitian	28
3.3 Operasionalisasi variabel penelitian.....	28
3.4 Populasi dan sampel penelitian.....	31
3.5 Jenis dan sumber data.....	31
3.6 Teknik pengolahan data.....	32
3.7 Skala pengukuran data.....	33
3.8 Uji validitas dan reliabilitas.....	33
3.9 Teknik analisis data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1	Sejarah Desa Busato	38
4.1.2	Struktur organisasi	41
4.1.3	Tugas pokok dan fungsi	43
4.2	Hasil penelitian	47
4.3	Gambaran variabel penelitian	51
4.3.1	Pemanfaatan dana desa (variabel X)	51
4.3.2	Pemberdayaan masyarakat (variabel Y)	55
4.4	Uji hipotesis	60
4.5	Pembahasan hasil penelitian	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	71
5.2.	Saran	72

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bobot nilai variabel.....	33
Tabel 3.2 Interpretasi koefisien korelasi.....	36
Tabel 4.1 Hasil vaiditas pemanfaatan dana desa (variabel X)	48
Tabel 4.2 Hasil vaiditas pemberdayaan masyarakat (variabel Y).....	49
Tabel 4.3 Uji reliabilitas pemanfaatan dana desa (variabel X)	50
Tabel 4.4 Uji reliabilitas pemberdayaan masyarakat (variabel Y)	50
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari dana desa tepat waktu	51
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa	52
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang perhitungan biaya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secermat mungkin (pembiayaan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang dicairkan).....	52
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standarisasi kegiatan (jelas tujuan kegiatan).....	53
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan.....	54
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang pemerintah desa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	54
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka	55
Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.....	56

Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan	56
Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka	57
Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa.....	58
Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya	58
Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu.....	59
Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan .	60
Tabel 4.19 Korelasi dan tingkat signifikansi antara pemanfaatan dana desa (variabel X) dan pemberdayaan masyarakat (variabel Y).....	61
Tabel 4.20 Koefisien pemanfaatan dana desa (variabel X) terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y).....	63
Tabel 4.21 Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Busato Tahun 2022.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pembangunan desa merupakan target utama pemerintah dalam upaya untuk meratakan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini sangat penting mengingat hampir sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan bekerja disektor pertanian. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan aktivitas pembangunan selama ini yang berpusat di daerah perkotaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara desa dan perkotaan. Akibatnya, banyak pendudukan desa berimigrasi ke kota karena penduduk desa beranggapan, daerah perkotaan memberikan harapan yang sangat besar untuk pengembangan diri mereka dan untuk mencari pekerjaan yang baru, selain bertani atau berkebun.

Perpindahan penduduk desa dalam bentuk migrasi ini, lambat laun akan menjadi persoalan baru untuk daerah perkotaan yang dituju, karena bertambahnya jumlah penduduk kota yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di kota, apalagi kalau tidak didukung oleh keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Untuk itulah, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, agar penduduk desa tidak pergi meninggalkan desa mereka dan tetap tinggl desa untuk membangun desa mereka masing-masing. Dalam kenyataannya, banyak desa memiliki sumber daya manusia yang handal dan dapat

dikembangkan di desa mereka masing-masing, dibandingkan kalau mereka pindah ke kota yang belum pasti menjamin masa depan mereka.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dalam rangka membangun desa, yakni dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diharapkan kegiatan pembangunan di desa dapat ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan desa dengan desa lainnya. Dana desa yang diberikan pemerintah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan desa agar tumbuh menjadi desa maju dan mandiri, agar ke depan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam rangka mengurangi kemiskinan, memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara satu desa dengan desa lainnya. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah merupakan anggaran yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa setiap tahun yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan masyarakat

berskala lokal, sebagai perwujudan otonomi desa yang didasarkan pada prinsip keadilan yang berpijak pada kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan dan berdasarkan kebutuhan prioritas.

Dapat dikatakan bahwa bahwa prioritas penggunaan dana desa ialah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang memberdayakan masyarakat adalah kegiatan pembangunan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam mengerahkan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik materiil maupun immateriil, terutama sumber daya finansial, sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat itu sendiri, agar dapat mandiri. Dengan kata lain, masyarakat berhak mengambil keputusan dan melaksanakan pembangunan. Model pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan, menganggap inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber utama pembangunan, dan mempertimbangkan kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Korten dalam Soetomo (2018) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat atau kerakyatan. Pendekatan ini mengakui pentingnya potensi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuasaan internal, melalui kemampuan untuk melakukan pengendalian internal atas sumber daya utama yang berwujud dan tidak berwujud melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Olehnya itu, dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa seharusnya ditujukan untuk mendanai kegiatan peningkatan pendapatan desa, perluasan skala ekonomi masyarakat atau kelompok masyarakat, dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6 ayat 5, yang dapat berupa kegiatan pelatihan usaha, pertanian, perdagangan, perikanan, teknologi tepat guna, penyuluhan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Dana desa banyak dimanfaatkan oleh desa penerima bantuan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakatnya karena kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan warga desanya. Salah desa yang memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah Desa Busato Kecamatan Pinogaluman yang merupakan bagian wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemerintah desa meyakini bahwa suatu desa akan menjadi desa mandiri dan memiliki ketahanan sosial ekonomi yang kuat apabila memiliki sumber daya manusia yang handal, dan hal in akan terwujud jika masyarakat desa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti selaku warga masyarakat Desa Busato dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yakni bapak

Mardan Umar, S.IP (7 September 2023), bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan optimal yang disebakan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat masih kurang optimal, padahal peran kelembagaan masyarakat sangat diperlukan untuk menggerakkan masyarakat. Di samping itu, pada tahap perencanaan penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat yang hadir sebagai perwakilan warga terkesan hanya sebatas untuk mendengarkan saja karena programnya berasal dari kepala desa, sehingga pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, tokoh masyarakat banyak yang kurang aktif mengemukakan pendapatnya. Demikian halnya dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang telah direncanakan pelaksanaannya tidak berkelanjutan karena kurangnya inovasi masyarakat. Permasalahan yang peneliti amati yakni kurang optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa padahal potensi mereka sangat besar untuk dikembangkan terutama kegiatan industri rumahan (*home industry*) yang banyak tetapi kurang pembinaan.

Berbagai permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya mengingat kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas masyarakat dalam pengembangan diri dan pembangunan desa, juga dapat menimbulkan inovasi masyarakat, yang kesemuanya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Busato. Suksesnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran dana desa, memang bukan pekerjaan yang mudah karena

membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara semua pihak yang berkepentingan, terutama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan di desa, dan lain-lain. Di samping itu, juga dibutuhkan tata kelola dana desa yang profesional agar program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, serta dapat memberikan dampak yang baik pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu diadakan sebuah penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

Seberapa besar pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.4. Manfaat penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk praktisi

Sebagai bahan masukan bagi kepala desa dan penangungjawab dana desa untuk lebih baik lagi dalam pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman, agar semua program pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran dan selesai seratus persen..

2. Untuk akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu pemerintahan khususnya pengembangan konsep pemanfaatan dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk peneliti

Untuk bahan perbandingan antara konsep dan teori yang diterima di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dana Desa

Dana desa mulai dikucurkan pemerintah pada tahun 2015, dengan demikian, setiap desa mendapat sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). Dalam pelaksanaannya, setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap oleh pemerintah desa. Distribusi pembagian dana desa dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dana desa sebagaimana bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektif program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN akan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota dan kabupaten, untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2016, Pasal 1 Ayat 2, dana desa adalah sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara desa yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk keperluan tersebut. untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan pembangunan pemerintah pelaksana dan masyarakat. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, pasal 3, disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 berisi lampiran contoh prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2020, yakni:

- a) Pembangunan desa berdasarkan pola padat karya
- b) Pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting
- c) Pengembangan anak usia dini
- d) Keamanan pangan di desa
- e) Pelayanan pendidikan untuk anak
- f) Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
- h) Pembelajaran dan pelatihan kerja
- i) Pembangunan penampungan air
- j) dan lain-lain

Di samping itu, dalam pemanfaatan dana desa juga menerapkan beberapa prinsip, yakni:

- a) Keadilan yaitu lebih berorientasi pada hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa dan tidak diskriminatif.

- b) Kebutuhan prioritas yakni lebih memprioritaskan kepentingan desa yang dianggap lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c) Kewenangan desa yakni memprioritaskan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d) Partisipatif yaitu memprioritaskan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa.
- e) Swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan memprioritaskan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam yang dimiliki desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan masyarakat desa dan kearifan lokal.
- f) Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2.2. Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa memiliki posisi penting dalam membangun desa yang salah satunya dapat dilihat pada keberhasilan dalam peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM), Mengacu pada data realisasi capaian keluaran dana desa dari Online Monitoring Sistem Perpendidaraan dan Anggaran Negara atau OM-SPAN, diperoleh informasi bahwa bisang pelaksanaan pembangunan desa mengambil porsi terbesar, jika dibandingkan dengan bidang lainnya. Dana desa menjadi salah satu faktor yang yang dapat memberikan andil terhadap peningkatan status desa dan pengurangan

angka kemiskinan desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemdes PDTT RI, dalam Ardiyani, dkk, 2021:179). Status desa tersebut ialah desa berkembang menjadi desa mandiri serta dapat mengentaskan ketertinggalan sumber pemasukan dan taraf hidup masyarakat sekitar lima ribu desa pada tahun 2014-2019. Selain itu, pengalokasian dana desa dari anggaran dan pendapatan belanja negara terus mengalami kenaikan, yakni rata 280 juta rupiah setiap desa. Demikian halnya dengan dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 1,8 Trilyun rupiah. Kecenderungan ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa.

Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa yang diterimanya, menurut Azhari (2016), penyimpangan tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya pembinaan kepada aparatur desa penerima dana desa. Pembinaan kepada aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa memang sangat diperlukan karena dana desa yang cukup besar tersebut, terkadang ada pemerintah desa yang tidak tau harus diapakan atau digunakan untuk apa dana tersebut, kemudian ditambah lagi pelaporan pemanfaatan dana desa yang masih banyak pemerintah desa kurang paham cara membuatnya. Hasil temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan bahwa salah satu penyumbang korupsi terbesar adalah dana desa.

Kondisi ini juga didukung oleh Nuha, dkk (2017) yang mengatakan bahwa aspek pengelolaan dana desa merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah desa penerima dana desa karena adanya keterbatasan regulasi, kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengawasan.

Pemanfaatan dana desa diarahkan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik di desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun, perlu digarisbawahi bahwa semua program yang didanai oleh dana desa hendaknya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja dana desa. Pada pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara tatakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Makmur (2017:7) mengatakan bahwa efektif tidaknya pemanfaatan suatu program atau kegiatan, dapat dilihat pada lima hal, yakni:

- a) Ketepatan waktu

Penggunaan waktu secara tepat akan memberikan pengaruh pada derajat keefektivitasan pelaksanaan program atau kegiatan untuk merealisasikan tujuan.

b) Ketepatan perhitungan biaya

Perhitungan biaya untuk membiayai program atau kegiatan haruslah secermat mungkin agar dalam pelaksanaan program atau kegiatan tidak terjadi kekurangan anggaran sampai program atau kegiatan tersebut selesai dilakukan.

c) Ketepatan dalam pengukuran

Untuk mencapai ketepatan dalam pengukuran dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan, maka harus ditetapkan standarisasi.

d) Ketetapan dalam menentukan pilihan

Ketepatan dalam membuat pilihan terkait program atau kegiatan apa yang harus mendapat prioritas terlebih dahulu. Hal ini juga berkaitan dengan ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan

e) Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka untuk menukseskan pelaksanaan program atau kegiatan.

2.3. Konsep pemberdayaan masyarakat

Di era pembangunan yang semakin maju, partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam bentuk pelayanan masyarakat dan donasi saja, namun masyarakat juga mendambakan kesempatan untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan. Menetapkan dan menyusun program pembangunan agar matang. mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan merupakan bentuk partisipasi yang harus dilembagakan untuk meningkatkan potensi masyarakat.

Sulistiyani (2014:79) berpendapat bahwa pemberdayaan pada hakikatnya adalah menciptakan suasana atau suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat (pemberdayaan). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tidak berdaya. Setiap masyarakat pasti mempunyai kekuasaan, namun terkadang masyarakat tersebut tidak menyadari atau tidak dapat mengetahui secara jelas kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, kekuasaan harus ditemukan dan kemudian dikembangkan. Jika hipotesis ini dikembangkan, maka pemberdayaan adalah upaya membangun kekuasaan dengan cara mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Selain itu, pemberdayaan juga tidak boleh menjebak masyarakat pada perangkap ketergantungan (charity), namun harus mengarah pada proses kemandirian.

Anwas (2013:50) menegaskan bahwa pemberdayaan berarti kesetaraan, keadilan dan demokrasi tanpa tekanan atau dominasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Perbedaan kepribadian dan kemampuan setiap individu tidak bisa dihindari. Namun setiap individu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Realitas kesetaraan dan perbedaan antar individu menjadi prinsip untuk mencapai

pemberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri, yang dilakukan secara demokratis agar dapat mengembangkan diri dan lingkungannya dengan meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Pembangunan yang memberdayakan masyarakat ialah pembangunan yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam mengerahkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, baik materil maupun immateriil, terutama sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mencapai kemandirian. Dengan kata lain, masyarakat berhak mengambil keputusan dan melaksanakan pembangunan. Model pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan, menganggap inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber utama pembangunan, dan mempertimbangkan kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.

Chambers dalam Alfitri (2016:22) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. Konsep ini lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan dasar atau penyediaan mekanisme untuk mencegah pemiskinan lebih lanjut (jaring pengaman), yang gagasannya belakangan ini dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan di masa lampau.

Menurut Sunyoto Usman dalam Alfitri (2016:24), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang merupakan bagian dari upaya memperkuat apa yang sering disebut dengan otonomi atau kemandirian masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat didukung untuk menganalisa permasalahan yang mereka hadapi, dibantu untuk mencari alternatif pemecahan masalah dan diberikan strategi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat didukung bagaimana merancang suatu kegiatan sesuai dengan kemampuan mereka, melaksanakan rancangan tersebut dan mengembangkan strategi untuk memperoleh sumber daya eksternal yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan kata lain, prinsip yang diperkenalkan dalam proses pemberdayaan adalah mencari peluang bagi individu untuk memutuskan apa yang diinginkannya berdasarkan kemauan, pengetahuan, dan kemampuannya sendiri.

Menurut Parson dalam Soeharto (2017:210), pemberdayaan ialah suatu proses dimana individu menjadi cukup kuat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kontrol dan pengaruh terhadap peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan berfokus pada orang-orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memberikan dampak pada kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang mereka urus.

White dalam Suhendra (2016:77) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political*

will), para penguasa. Kemudian menurut Suhendra (2006:86) indikator masyarakat yang berdaya adalah:

- a. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat

Hal ini berarti masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka dan sekitarnya. Mereka melihat sumber daya yang ada dalam dirinya sebagai landasan melangsungkan kehidupannya, agar tidak menjadi beban begi pihak lain,

- b. Dapat berjalannya “*bottom up planning*”

Ini berarti bahwa masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan.

- c. Kemampuan dan aktivitas ekonomi

Hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka atau dengan kata lain masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk mencari penghasilan.

- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga

Hal ini berarti masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya.

- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Hal ini berarti masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu. Kemampuan berpendapat adalah keinginan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang dimilikinya. Kemampuan berpendapat juga dapat melatih siswa untuk dapat berpikir kritis dan terampil dalam bicara.

2.4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan desa menempatkan posisi penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi dengan pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat dari banyaknya program pembangunan desa, baik pembangunan fisik dan non fisik, yang kesemuanya membutuhkan keikutsertaan masyarakat desa sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Menurut Anwas (2013:51), pemberdayaan juga menekankan pada proses dan bukan sekedar hasil (produk) dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan ialah tingkat partisipasi atau pemberdayaan yang dicapai oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin sukses pula kegiatan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan dalam konteks sosial adalah kemampuan individu untuk berpartisipasi

aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi keterlibatan fisik dan mental serta manfaat yang diperoleh individu yang terlibat.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan serangkaian proses yang panjang (tidak langsung) agar mereka menjadi lebih mandiri. Proses pemberdayaan cenderung terkait dengan dinamika sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan merupakan upaya dan proses yang berperan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan, khususnya pengembangan diri. Menurut Saraswati dalam Alfitri (2016:23), secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam unsur berikut:

- a) Belajar sambil melakukan. Artinya pemberdayaan merupakan suatu proses pembelajaran yang berkesinambungan dan melakukan tindakan nyata yang dampaknya dapat terlihat.
- b) Pemecahan masalah. Pemberdayaan harus berarti penyelesaian permasalahan yang dianggap penting dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat.
- c) Penilaian diri. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan penilaian secara mandiri.
- d) Pengembangan dan koordinasi pribadi. Artinya mendorong pengembangan diri dan semakin memperluas koordinasi dengan orang lain.
- e) Pilih dirimu sendiri. Sebuah tim berkembang melalui upaya seleksi dan evaluasi independen untuk menentukan langkah masa depan.
- f) Buatlah keputusan sendiri. Memilih tindakan yang tepat, Anda harus memiliki kepercayaan diri untuk memutuskan sesuatu secara mandiri.

Suharto dalam Alfitri (2016:26), mengatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan lima cara yang disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

1. Kemampuan:menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus dapat membebaskan masyarakat dari hambatan budaya dan struktural yang menghambatnya
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah dari penindasan kelompok kuat, menghindari persaingan tidak sehat (apalagi tidak sehat) antara kelompok kuat dan lemah, mencegah kelompok kuat mengeksplorasi kelompok lemah.
4. Dukungan. Memberikan nasehat dan dukungan agar masyarakat dapat memenuhi peran dan tugasnya dalam kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjerumus pada posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan. Menjaga kondisi yang menguntungkan untuk menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan sehingga setiap orang mempunyai kesempatan untuk berusaha.

Menurut Usman (2012:21), setidaknya ada dua jenis perspektif terkait penanganan persoalan pemberdayaan masyarakat (khususnya kelompok miskin) agar mempunyai akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, yaitu (1) perspektif sentralisasi, fokus perhatian pada alokasi sumber daya, dan (2) perspektif sentralisasi. pandangan yang memusatkan perhatian pada kinerja institusi

Hipotesis yang mereka kembangkan berbeda-beda. Dalam perspektif pertama, ketidakberdayaan kelompok miskin dipandang sebagai akibat (atau setidaknya berkaitan dengan) suatu sindrom kemiskinan yang sudah mengakar dalam kehidupan kelompok miskin itu sendiri. Dari sudut pandang kedua, ketidakberdayaan dipandang sebagai konsekuensi dari bentuk-bentuk pengelolaan layanan kesehatan yang diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin).

2.5. Tujuan pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha memberdayakan masyarakat desa, serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan. Olehnya itu, kegiatan pemberdayaan harus lebih ditekankan lagi pada pencapaian tujuan

kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Menurut Mardikanto (2017:202), ada enam tujuan pemberdayaan, yakni:

- a) Perbaikan Kelembagaan “Better Institution”

Dengan perbaikan aktivitas yang dilakukan, diharapkan kelembagaan menjadi lebih baik, khususnya pengembangan jaringan kerja sama dunia usaha.

- b) Perbaikan Usaha “Better Business”

Peningkatan semangat belajar pendidikan, peningkatan aksesibilitas usaha, perbaikan kegiatan dan kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan usaha yang dilakukan.

- c) Perbaikan Pendapatan “Better Income”

Meningkatnya antusiasme terhadap pembelajaran pendidikan, peningkatan akses terhadap bisnis, dan peningkatan praktik dan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan volume bisnis yang dilakukan.

- d) Perbaikan Lingkungan “Better Environment”

Meningkatkan pendapatan memerlukan perbaikan lingkungan “fisik dan sosial”, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.

e) Perbaikan Kehidupan “Better Living”

Peningkatan tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan diharapkan akan meningkatkan taraf hidup setiap keluarga dan masyarakat.

f) Perbaikan Masyarakat “Better Community”

Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik diharapkan akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.6. Tahapan pemberdayaan

Menurut Soekanto (2014:63), pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yakni:

a) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b) Tahapan Pengkajian “Assessment”

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus

berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c) Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e) Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan

program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

f) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebainya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2.7. Kerangka konseptual

Pemanfaatan dana desa dalam menunjang kegiatan pembangunan desa sangat penting dikelola dengan baik karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa

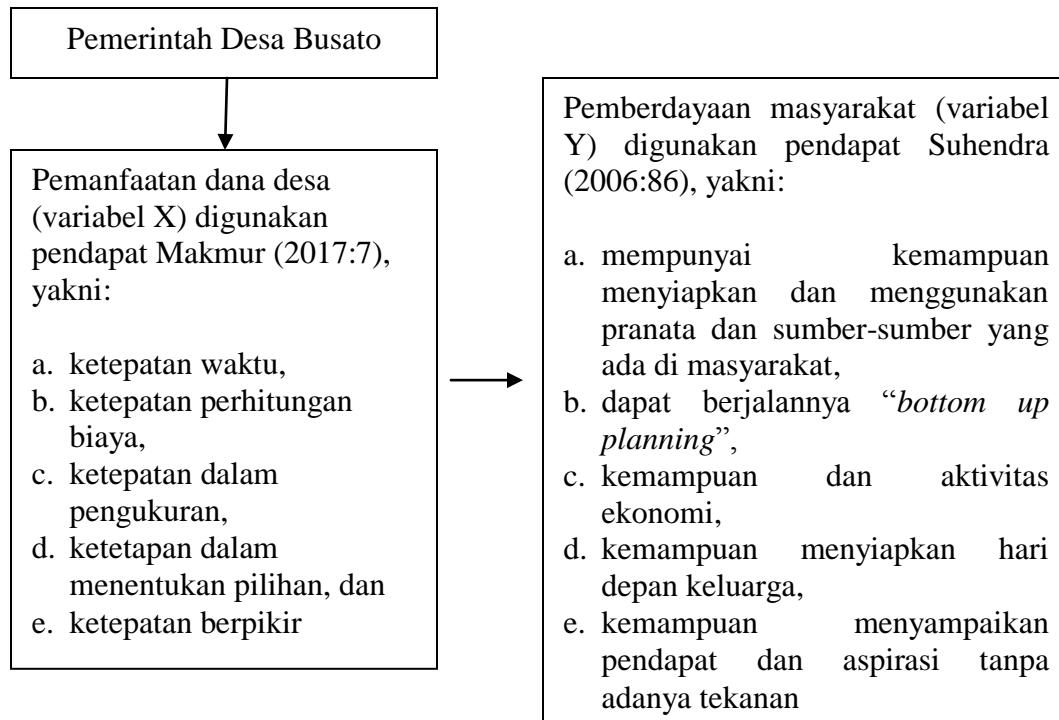
secara keseluruhan. Penelitian ini akan mengkaji terkaitan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Busato.

Untuk mengukur pemanfaatan dana desa (variabel X) digunakan pendapat Makmur (2017:7), yang menyebutkan bahwa efektif tidaknya pemanfaatan suatu program atau kegiatan, dapat dilihat pada lima hal, yakni: a) ketepatan waktu, b) ketepatan perhitungan biaya, c) ketepatan dalam pengukuran, d) ketetapan dalam menentukan pilihan, dan e) ketepatan berpikir.

Selanjutnya, untuk mengukur pemberdayaan masyarakat (variabel Y) digunakan pendapat Suhendra (2006:86) yang mengatakan bahwa indikator masyarakat yang berdaya adalah: a) mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, b) dapat berjalannya “*bottom up planning*”, c) kemampuan dan aktivitas ekonomi, d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, dan e) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kerangka konseptual



2.8. Hipotesis

Menurut Riduwan (2018:35) hipotesis ialah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho: Pemanfaatan dana desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di

Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ha: Pemanfaatan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa

Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini di lakukan selama tiga bulan.

3.2 Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survey menurut Singarimbun dan Effendi (2006: 3) adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan, metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:8), dapat dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, menganalisis, menganalisis data kuantitatif/statistik, untuk tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalisasikan variabel penelitian sebagai berikut:

Pemanfaatan dana desa dapat dilihat pada lima hal, yakni:

- a) Ketepatan waktu ialah pemanfaatan waktu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran dana desa selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b) Ketepatan perhitungan biaya ialah perhitungan biaya untuk membiayai program atau kegiatan dilakukan secermat mungkin.
- c) Ketepatan dalam pengukuran ialah ketepatan dalam pengukuran dalam melaksanakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standarisasi.
- d) Ketetapan dalam menentukan pilihan ialah ketepatan dalam membuat pilihan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan.
- e) Ketepatan berpikir ialah ketepatan berpikir untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ialah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang dapat dilihat dari:

- a) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat ialah masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka dan sekitarnya.

- b) Dapat berjalannya “*bottom up planning*” ialah masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan.
- c) Kemampuan dan aktivitas ekonomi ialah masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka atau dengan kata lain masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk mencari penghasilan.
- d) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga ialah masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya.
- e) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan ialah masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu.

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner akan disusun dengan menyiapkan (lima) pilihan. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda.

Selalu (Sl)	= 5
Sering (Sr)	= 4
Kadang-kadang (KK)	= 3
Jarang (Jr)	= 2
Tidak pernah (TP)	= 1

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah gabungan seluruh unsur yang berupa peristiwa, benda, atau orang yang mempunyai sifat serupa dan menjadi fokus perhatian peneliti karena dianggap penelitian (Ferdinand, 2006: 223). Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Busato.

3.4.2 Sampel

Perolehan sampel yang secara akurat mencerminkan karakteristik populasi dalam hal ini bergantung pada dua faktor, yaitu metode pengambilan sampel dan penentuan besar sampel. Sampel menurut Arikunto dalam Riduwan (2020:56) adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).

Karena jumlah populasi relatif besar, maka metode penarikan sampelnya menggunakan teknik aksidental, yaitu siapa saja warga masyarakat Desa Busato yang kebetulan ditemui peneliti akan dijadikan sampel, dengan ketentuan warga masyarakat tersebut pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Busato. Adapun warga masyarakat yang bersedia memberikan respon dengan mengisi kuesioner ialah sebanyak 39 orang.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dan data kualitatif yaitu data dalam bentuk digital seperti ringkasan riwayat, uraian tugas, responden. tanggapan.

3.5.2 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari responden berupa argumen terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.
- b) Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari ksntor Desa Busato yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner, yaitu mengedarkan daftar pertanyaan yang telah tersusun secara sistematik, kemudian diberikan kepada para responden untuk dijawab, kemudian diolah dan analisis. Menurut Riduwan (2020:99), kuesioner/angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.

3.7 . Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Editing, yaitu melihat ulang kebenaran data yang didapat.
2. Tabulasi, yaitu menginput data ke tabel sebagai bahan kajian..
3. Interpretasi, yaitu menguraikan data yang telah ditabulasi untuk menghasilkan kesimpulan.

3.8. Skala Pengukuran Data

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa pengukuran variabel dalam skala interval menggunakan alat skala likert. Kuesioner akan disebar dengan 5 pilihan jawaban, yaitu.

Tabel 3.1
Bobot nilai variabel

Pilihan	Bobot
Sangat	5
Sering	4
Cukup	3
Kurang	2
Tidak pernah	1

Skala Likert menurut Sugiyono (2018) digunakan sebagai acuan untuk menentukan kelas interval hasil penelitian.

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas atau validasi digunakan untuk mengkaji seberapa akurat dan tepat suatu kuesioner dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pengukuran. Instrumen penelitian ini dapat dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang hendak diukur dan dapat mengungkapkan data serta variabel yang diteliti secara konsisten. Validitas adalah suatu ukuran yang berkaitan dengan tingkat ketepatan yang dicapai oleh suatu indikator dalam mengukur apa yang hendak diukur, khususnya memastikan bahwa alat ukur yang digunakan, dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, sesuai dengan objek yang akan diukur.

Pada uji validitas instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dengan skor total pada taraf signifikansi 95% atau $= 0,05$. Karena skala data pada penelitian ini menggunakan skala likert, maka uji validitasnya menggunakan korelasi product moment. Instrumen dikatakan mempunyai kriteria validitas jika nilai signifikansi korelasi $= 0,05$ atau jika nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,30 (Sugiyono 2018).

3.9.2. Uji Reliabiliti Instrumen (*Test of Reliability*)

Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui reliabilitas suatu alat ukur atau untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur jika digunakan untuk mengukur objek yang sama berkali-kali. Dengan kata lain, uji reliabilitas ini dapat dipahami sebagai derajat kepercayaan terhadap hasil pengukuran. Pengukuran yang

sangat reliabel adalah pengukuran yang mampu memberikan hasil pengukuran yang dapat diandalkan. Pemeriksaan keandalan dilakukan terhadap elemen pelaporan yang valid. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Alpha Cronbach. Nilai ambang batas yang diterima untuk Cronbach's Alpha adalah 0,60, meskipun hal ini bukan merupakan standar mutlak menurut Sekaran (2000).

Instrumen dianggap mempunyai tingkat reliabilitas yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang diukur sebesar 0,60. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila dapat digunakan untuk mengukur variabel secara berulang-ulang, menghasilkan data yang sama atau hanya sedikit memvariasikannya (Supranto, 2005).

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat khususnya pengaruh penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Adapun rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2018:258) :

$$Y = \beta_0 + \beta X + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependent

β_0 : Koefisien regresi (konstanta)

β : Koefisien regresi

X: Variabel independent

Y : Variabel dependent

Berdasarkan rumus diatas dapat diimplikasikan dalam penelitian ini:

$$Y = a + b \cdot X$$

Keterangan : Y : Variabel

dependent a : Koefisien regresi

(konstanta) b: Koefisien regresi

X: Variabel independent (pemanfaatan dana desa)

Y : Variabel dependent (pemberdayaan masyarakat)

Rumus tersebut adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato, yaitu dengan menggunakan tabel koefisien dengan nilai koefisien sebagai berikut:

Tabel 3.2. Interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Cukup kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Riduwan (2020:136)

3.10.2 Uji Parsial (*t-test*)

Uji partial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel pemanfaatan dana desa mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent yaitu pemberdayaan masyarakat secara parsial.

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS 20. dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05% :

- Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji.
- Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Busato

Pada tahun 2000 telah dilaksanakan rapat oleh Pemerintah Desa Kayuogu dalam rangka Penunjukan Kepala Dusun IV Busato. Rapat tersebut dipimpin oleh Sangadi Kayuogu Fahrudin Desei dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Kayuogu, tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Busato, Dalam materi rapat tersebut membahas tentang pengangkatan kepala dusun IV Busato, dan setelah melalui pembahasan disepakati yang menjadi Kepala Dusun Busato adalah Yuldin Salote. Kepala dusun yang baru diangkat menyampaikan program kerja kepada masyarakat Busato melalui Sangadi Kayuogu

1. Masjid Busato harus dipugar / direnovasi
2. Dusun Busato harus membangun Balai Pertemuan
3. Dusun Busato harus Menjadi Desa

Semua program ini disetujui oleh Masyarakat Busato melalui Sangadi Kayuogu. Seiring berjalanya waktu pelaksanaan pembangunan dan dengan termotivasi lagu Dusun Busato menjadi desa, maka perencanaan Dusun Busato menjadi Desa sudah mulai tampak dan selalu didengung-dengungkan oleh masyarakat Busato hingga rencana pembangunan terlaksana

1. Masjid Busato yang dibangun Tahun 1976 direhab total atau direnovasi kembali bulan April 2001
2. Pembangunan balai pertemuan dusun dibangun Tahun 2003, dengan hibah tanah lokasi pembangunan dari bapak Yunus Kagi,
3. Dengan dialaksanaknya awal pembangunan Balai Pertemuan (KANTOR DESA Busato) sekarang, ini masyakat selalu berharap Dusun Busato menjadi desa.

Dengan memperhatikan harapan masyarakat dan petunjuk Camat Pinogaluman Drs. D. Korompot dan Sangadi Kayuogu Fahrudin Desei, maka pemerintah Dusun Busato melaksanakan rapat pembentukan panitia pemekaran desa tahun 2004 dengan materi sbb :

- 1 Pembentukan panitia pemekaran
- 2 Membahas nama desa
- 3 Membahas batas Desa Persiapan Busato dan Desa Kayuogu
4. Membahas Struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan Busato

Dengan melalui Musyawarah mufakat menetapkan :

1. PANITIA PEMEKARAN

NO	NAMA	JABATAN
1	YULDIN SALOTE	KETUA
2	DJAINUDIN HARUN	SEKRETARIS
3	YANI AMU	BENDAHARA
4	MARDAN UMAR	ANGGOTA
5	HAMID KAGI	ANGGOTA
6	SATRIN AULA	ANGGOTA
7	AMIR LATAMA	ANGGOTA
8	REMI KAGI	ANGGOTA

9	NARU BLONGKOD	ANGGOTA
10	SAPRIN KAGI	ANGGOTA
11	KARIM BLONGKOD	ANGGOTA
12	IMRAN KAGI	ANGGOTA
13	KADIR TALIB	ANGGOTA
14	SOPYAN LATAMA	ANGGOTA

II. Menetapkan Nama Desa adalah Desa Busato,

Desa Busato berasal dari kata Butato/ Busato atau Butatoa dalam Bahasa Gorontalo yang artinya LINTASAN, karena Umumnya Wilayah ini menjadi akses jalan atau lintasan Masyarakat Desa Buata menuju Kecamatan Atinggola, begitu pula sebaliknya. Dengan melihat kondisi dan berbagai kebutuhan masyarakat dan upaya dalam suatu kemajuan peningkatan sumber daya Manusia serta potensi wilayah , mendorong masyarakat untuk menjadikan Dusun IV Busato Desa Kayuogu menjadi Desa Busato.

Dengan dimekarkannya Desa Busato, maka jelaslah bahwa dampak dari suatu pemekaran sangat berarti bagi Masyarakat sehingga perubahan pola pikir dapat dirasakan

III. Batas batas sbb: Sebelah Utara	Desa Batutajam
Sebelah Selatan	Sungai Andagile/Prop.Gorontalo
Sebelah Timur	Kecamatan Kaidipang
Sebelah Barat	Desa Kayuogu

4.1.2 Struktur organisasi

Dengan terbentuknya struktur organisasi Pemerintahan Desa Persiapan Busato, panitia pemekaran dan masyarakat saling bahu membahu membenahi lingkungan masyarakat dan mendorong agar rencana ini segera terwujud. Panitia dan masyarakat saling berdialog tentang rencana pemekaran desa dan atas petunjuk seorang tokoh Bolaang Mongondow tinggal di Jakarta bapak Adri Salote mengajak panitia pemekaran menghadap Bupati Bolaang Mongondow di Kota Mobagu.

Alhamdulillah, ketua panitia pemekaran desa diterima oleh Bupati Bolaang Mongondow pada hari Rabu 14 maret 2005 Jam 02 dini hari di ruang Kerja Bupati Bolaang Mongondow dengan 1 pertanyaan “jika Dusun Busato jadi satu desa, anda bawa kemana desa itu”. Pertanyaan ini terjawab disertai penjelasan, hingga beliau Bupati Bolaang Mongondow menyambut harapan Panitia dan mengundang untuk melihat masyarakat Dusun Busato,

Tepatnya hari Kamis, 15 Maret 2005, Rombongan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tiba di Busato Pukul 18.00, dan disambut meriah oleh Masyarakat Busato. Dengan hadirnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah lebih menambah semangat Masyarakat Busato membenahi, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemekaran Desa. Seiring berjalananya waktu Pertanyaan dan harapan masyarakat selalu mengiang ditelinga panitia dengan bisikan lebih menambah semangat panitia memperjuangkan berkoordinasi dengan pemerintah

Desa Kayuogu, Pemerintah Kecamatan Pinogaluman dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar harapan Masyarakat segera terjawab.

Berkat dukungan doa dan kerja sama yang baik pejabat Sangadi Desa Persiapan diundang Oleh Bupati Bolang Mongondow dengan Agenda pengresmian Desa Persiapan Busato dan pelantikan penjabat Sangadi Desa Persiapan Busato Bapak Kadir Talib.pada tanggal 23 januari 2006. Dengan diresmikannya Dusun Busato menjadi desa dan dilantiknya Penjabat Sangadi Desa Persiapan Busato. Pada Tanggal 23 Januari 2006, maka lahirlah sejarah baru'nuansa baru, semangat baru dengan langkah pasti Pemerintah Desa Busato dan masyarakat semakin antusias mendukung program pemerintah disegala bidang.

Sebagai Desa baru diresmikan, berhubung Balai Pertemuan belum selesai guna persiapan Kantor Desa Busato, maka Pemerintah Desa Persiapan Busato Menggunakan Rumah Ibu Hamida Palaji sebagai Kantor sementara guna pelayanan kepada masyarakat Desa Busato. Penjabat Sangadi Busato dan perangkatnya bersama lembaga yang baru terbentuk antara BPD, LPM, PKK segera menyusun program kegiatan dibidang pemerintahan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Penjabat Sangadi Busato dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan sangadi dipinitif dan desa dipinitif, sehingga dilaksanakan Pemilihan Sangadi Busato Pada Tahun 2008 dengan Calon terpilih Bapak Mardan Umar menjadi Sangadi Busato divinitif.

Dengan dilantiknya Sangadi Busato Divinitif Tahun 2008, berbagai macam Program yang tercipta yang di Rumuskan melalui RPJMDes 2009 s/d 2014 dengan visi Misi dan Grand Strategi yang menjadi arah kebijakan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan

Berikut Nama Sangadi Busato dari Tahun 2006 s/d Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN MENJABAT	KETERANGAN
1	Kadir Talib	Pj. Sangadi Desa Periapan	2008 S/D 2008	Penjabat
2	Maradn Umar	Sangadi	2008 S/D 2014	Divinitif
3	Mardan Umar	Sangadi	2014 S/D 2018	Divinitif/Calon Anggota DPRD
4	Hamid Dunggio, S.Pd	Pj Sangadi	2019	Mutasi
5	Yuldin Salote	PJ.Sangadi	2020 s/2021	Mutasi
6	Samsudin Pakaya	Sangadi	2021 s/d 2022	Divinitif/meninggal
7	Yuldin Salote	Pj.Sangadi	2022 s/d 2023	Penjabat
8	Aries Pratama Daud	Sangadi	2023 s/d Sekarang	Divinitif

Harapan masyarakat dalam mencapai suatu kesejahteraan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menunjang kegiatan disegala bidang, terutama bidang pertanian dan perkebunan, nampaklah antusias masyarakat Desa Busato berkeinginan maju mandiri dalam membangun desa menuju kesejahteraan dan kemakmuran dimasa akan datang.

4.1.3 Tugas pokok dan fungsi

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa

- b) Membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - d) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
 - e) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
 - f) Mengajukan raperdes dan bersama BPD menetapkan peraturan desa.
 - g) Melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - h) Menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun dalam peraturan desa.
 - i) Menetapkan keputusan kepala desa sebagai peraturan pelaksanaan peraturan desa.
 - j) Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan
 - k) Menyelenggarakan tertib keuangan desa
 - l) Menyelenggarakan tertib pertanahan, termasuk bondo desa
 - m) Menyelenggarakan tertib administrasi dan pengeraian registrasi desa.
 - n) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat.
 - o) Mendorong dan mewujudkan usaha-usaha peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - p) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan
2. Sekretaris desa
- Sekretaris desa mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - b) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan administrasi yang dilakukan oleh kepala urusan.
 - c) Menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumuskan program dan petunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Kasie pemerintahan
- Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban. Adapun tugas dan kewajibannya adalah:
- a) Menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan.
 - b) Menyusun rencana dan program pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - c) Menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pertahanan sipil.
 - d) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.
 - e) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.

- f) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat didalam urusan pemerintahan.
 - g) Mengerjakan register desa.
 - h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa secara periodik.
 - i) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
4. Kasie kesejahteraan
- Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi kesejahteraan sosial. Adapun tugas dan kewajibannya adalah:
- a) Menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
 - b) Menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.
 - c) Menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
 - d) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.
 - e) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di dalam urusan kesejahteraan sosial.
 - f) Mengerjakan register desa.

- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa secara periodik.
 - h) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan sekretaris desa
5. Kasie pelayanan
- Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas:
- a) Melaksabakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

4.2 Hasil penelitian

Langkah pertama yang dilakukan sebelum pengolahan data ialah melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendekati kenyataan atau obyektif. Dan untuk dapat meyakini bahwa kuesioner atau alat ukur yang valid dan andal, maka kuesioner tersebut sebelum digunakan harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data yang objektif. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian.

4.2.1 Hasil uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Dalam pengujian validitas,

instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Karena skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji validitas menggunakan korelasi *product moment*. Instrumen dikatakan valid dengan menggunakan kriteria apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji validitas kusioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Hasil validitas pemanfaatan dana desa (variabel X)

Variabel	No. Item	r_{hitung}	$r_{tabel} = 0,325$ ($\alpha = 0,05$; $n = 39$ $Dk = n-2 = 39-2 = 37$)	Keputusan
Pemanfaatan dana desa (variabel X)	1	0,798	0,325	valid
	2	0,797	0,325	valid
	3	0,855	0,325	valid
	4	0,798	0,325	valid
	5	0,757	0,325	valid
	6	0,822	0,325	valid

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.1 dapat dilihat hasil perhitungan nilai r_{hitung} pemanfaatan dana desa (variabel X) yang terdiri atas enam pertanyaan, semuanya menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,325), sehingga disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dapat dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2

Hasil validitas pemberdayaan masyarakat (variabel Y)

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel = 0,325 ($\alpha = 0,05$; n = 39 Dk = n-2 = 39-2 = 37)	Keputusan
Pemberdayaan masyarakat (variabel Y)	1	0,587	0,325	valid
	2	0,650	0,325	valid
	3	0,691	0,325	valid
	4	0,788	0,325	valid
	5	0,792	0,325	valid
	6	0,680	0,325	valid
	7	0,762	0,325	valid
	8	0,560	0,325	valid

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.2 dapat dilihat hasil perhitungan nilai r_{hitung} pemberdayaan masyarakat (variabel Y) yang terdiri atas delapan pertanyaan, semuanya menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,325), sehingga disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dapat dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2 Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan dimaksudkan apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, dengan ketentuan nilai ambang batas adalah 0,60. Artinya, kalau nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai standar

0,60, maka pertanyaan dikatakan kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Uji reliabilitas pemanfaatan dana desa (variabel X)

<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Pertanyaan
0.933	6

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil pengujian reliabilitas pemanfaatan dana desa (variabel X) melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,993, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai standar = 0,60, sehingga dengan demikian dapat diputuskan bahwa semua pertanyaan pemanfaatan dana desa (variabel X) dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

Tabel 4.4
Uji reliabilitas pemberdayaan masyarakat (variabel Y)

<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Pertanyaan
0.898	8

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil pengujian reliabilitas pemberdayaan masyarakat (variabel Y) melalui metode *Cronbach's Alpha*, didapat nilai sebesar 0,898, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai standar = 0,60, sehingga dengan demikian dapat diputuskan bahwa semua pertanyaan pemberdayaan masyarakat (variabel Y) dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

4.3 Gambaran variabel penelitian

4.3.1 Pemanfaatan dana desa (variabel X)

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diedarkan, diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel pemanfaatan dana desa (variabel X), dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari dana desa tepat waktu

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	5	12.8
Sering	14	35.9
Kadang-kadang	16	41.0
Jarang	4	10.3
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.5 tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari dana desa tepat waktu, sebagian besar responden mengatakan kadang-kadang yakni sebesar 16 orang (41,0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari dana desa kadang-kadang tepat waktu.

Tabel 4.6

Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	4	10.3
Sering	16	41.0
Kadang-kadang	15	38.5
Jarang	4	10.3
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.6 tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 16 orang (41,0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, sering sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang perhitungan biaya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secermat mungkin (pembiayaan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang dicairkan)

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	6	15.4
Sering	12	30.8
Kadang-kadang	15	38.5
Jarang	6	15.4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.7 tentang perhitungan biaya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secermat mungkin (pembiayaan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang dicairkan), sebagian besar responden mengatakan

kadang-kadang yakni sebesar 15 orang (38,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat kadang-kadang dilakukan secermat mungkin (pembiayaan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang dicairkan)

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standarisasi kegiatan (jelas tujuan kegiatan)

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	5	12.8
Sering	14	35.9
Kadang-kadang	17	43.6
Jarang	3	7.7
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.8 tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standarisasi kegiatan (jelas tujuan kegiatan), sebagian besar responden mengatakan kadang-kadang yakni sebesar 17 orang (43,6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat kadang-kadang berdasarkan standarisasi kegiatan (jelas tujuan kegiatan).

Tabel 4.9

Tanggapan responden tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	6	15.4
Sering	15	38.5
Kadang-kadang	14	35.9
Jarang	4	10.3
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.9 tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan, sebagian besar responden mengatakan kadang-kadang yakni sebesar 15 orang (38,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sering mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang pemerintah desa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	5	12.8
Sering	15	38.5
Kadang-kadang	13	33.3
Jarang	6	15.4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.10 tentang pemerintah desa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

sebagian besar responden mengatakan kadang-kadang yakni sebesar 15 orang (38,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sering mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

4.3.2 Pemberdayaan masyarakat (variabel Y)

Dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang diedarkan, diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel pemberdayaan masyarakat (variabel Y) dimana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	8	20.5
Sering	20	51.3
Kadang-kadang	11	28.2
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.11 tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 20 orang (51,2%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat sering memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	7	17.9
Sering	20	51.3
Kadang-kadang	7	17.9
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.12 tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 20 orang (51,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat sering mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain

Tabel 4.13

Tanggapan responden tentang masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	5	12.8
Sering	21	53.8
Kadang-kadang	11	28.2
Jarang	2	5.1
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.13 tentang masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan

rencana pembangunan, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 21 orang (53,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan.

Tabel 4.14

Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	5	12.8
Sering	23	59.0
Kadang-kadang	11	28.2
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.14 tentang masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 23 orang (59,0%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka

Tabel 4.15

Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	10	25.6
Sering	20	51.3
Kadang-kadang	9	23.1
Jarang	0	0
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.15 tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 20 orang (51,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat sering memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa. Hal ini terjadi karena masyarakat mendapat pelatihan bagaimana cara mengolah sumber daya alam sehingga bernilai ekonomis, seperti cara pengolahan gula merah.

Tabel 4.16

Tanggapan responden tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	9	23.1
Sering	20	51.3
Kadang-kadang	9	23.1
Jarang	1	2.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.6 tentang setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 20 orang (51,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat sering memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya.

Tabel 4.17

Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu

Alternatif pilihan	Frekuensi	Percentase (%)
Selalu	7	17.9
Sering	21	53.8
Kadang-kadang	10	25.6
Jarang	1	2.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.17 tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 21 orang (53,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu.

Tabel 4.18

Tanggapan responden tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan

Alternatif pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	8	20.5
Sering	17	43.6
Kadang-kadang	11	28.2
Jarang	3	7.7
Tidak pernah	0	0
Jumlah	39	100%

Sumber: kuesioner, 2023

Pada tabel 4.18 tentang masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan, sebagian besar responden mengatakan sering yakni sebesar 17 orang (43,6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan.

4.4 Uji hipotesis

1. Analisis korelasi

Hubungan antara variabel perlu diketahui untuk mengetahui seberapa hubungan yang dimiliki antara kedua variabel tersebut. Analisis korelasi dimaksudkan untuk menentukan hubungan dan besarnya hubungan antara dua variabel yang diteliti dalam penelitian, yaitu pemanfaatan dana desa (variabel X) dan pemberdayaan masyarakat (variabel Y). Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut, maka

dilakukan uji analisis korelasi product moment. Berikut hasil analisis korelasi antara kedua variabel penelitian.

Tabel 4.19

Korelasi dan tingkat signifikansi antara pemanfaatan dana desa (variabel X) dan pemberdayaan masyarakat (variabel Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.530	3.07285	1.457

Sumber: olahan kuesioner, 2023

Dengan bantuan SPSS versi 20, didapat tabel summary yang memuat nilai korelasi dan determinasi. Dengan menggunakan analisis korelasi sebagaimana yang diperlihatkan tabel 4.19 tersebut, terlihat bahwa besaran korelasi diberi simbol R = 0,737, sehingga dengan demikian nilai korelasi (r) hasil perhitungan ialah 0,737 (73,7%).

Kemudian untuk mengetahui determinasi pemanfaatan dana desa (variabel X) terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y) dapat dilihat pada R Square, yakni sebesar 0,543, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ialah sebesar 0,543 atau 54,3%. Hal ini berarti bahwa 54,3% pemberdayaan masyarakat di Desa Busato, dapat diterangkan oleh pemanfaatan dana desa (variabel X).

Dengan demikian, apabila pemanfaatan dana desa (variabel X) ditingkatkan kualitasnya, maka setiap unit kenaikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y) sebesar 0,543 (54,3%). Ramalan yang

dikembangkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, apabila pemanfaatan dana desa (variabel X) dinaikkan sebesar 10 kali, maka pemberdayaan masyarakat (variabel Y) akan bertambah sebesar 0,543 (54,3%). Hal ini memungkinkan untuk perbaikan dan penataan kembali pemanfaatan dana desa termasuk peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Busato.

Dengan demikian, antara variabel pemanfaatan dana desa (variabel X) memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y). Jika dimasukkan dalam norma interpretasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3 (tabel interpretasi koefisien korelasi), maka hasil penelitian yang didapat yakni $r = 0,737$ berada pada tingkat hubungan yang kuat dengan nilai rentangan antara nilai 0,60 sampai dengan 0,799. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yaitu dana desa memprioritaskan pendanaan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, diprioritaskan melalui tata kelola dengan menggunakan bahan baku lokal, dan berupaya untuk menarik lebih banyak pekerja masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan implikasi dari strategi pembangunan masyarakat (*people centered development*). Dalam hal ini, bagaimanapun pengertiannya, selalu mengacu pada upaya peningkatan kualitas hidup manusia, baik jasmani, rohani, ekonomi, dan sosial ekonomi. -secara budaya (Totok dalam Gusmeri, dkk., 2019:2). Program pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan dan

sasaran yang berguna untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aprillia dkk. dalam Gusmeri dkk. (2019:2) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memungkinkan peningkatan akses terhadap tindakan yang baik, perbaikan tindakan (better action), diikuti dengan perbaikan kelembagaan dan dunia usaha untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta perbaikan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik.

2. Analisis regresi sederhana dan pengujian hipotesis

Analisis regresi dalam penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh antara dua variabel penelitian, yakni pemanfaatan dana desa (variabel X) terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y). Analisis regresi sederhana merupakan peramalan yang berguna untuk meramalkan atau memprediksi variabel pemberdayaan masyarakat (variabel Y) apabila variabel pemanfaatan dana desa (variabel X) diketahui. Hasil penelitian dengan uji regresi sederhana didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.20

Koefisien pemanfaatan dana desa (variabel X) terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.650	2.368		6.608	.000
Pemanfaatan dana desa (variabel X)	.727	.110	.737	6.627	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)

Pada hasil olah data yang dilihat pada tabel 4.20, dapat dikatahui bahwa persamaan regresi sederhana hasil penelitian ini, sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$

$$\hat{Y} = 15,650 + 0,727 \cdot X$$

Makna dari persamaan regresi tersebut ialah bahwa konstanta sebesar 15,650 mengatakan bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari pemanfaatan dana desa (variabel X), maka nilai pemberdayaan masyarakat (variabel Y) adalah 15,650. Koefisien regresi sebesar 0,727 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai pemanfaatan dana desa (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,727.

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel pemberdayaan masyarakat (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari pemanfaatan dana desa (variabel X) terhadap pemberdayaan masyarakat (variabel Y), adalah sebagai berikut: Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat.

Ho: Pemanfaatan dana desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ha: Pemanfaatan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig* sebagai berikut.

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \leq \text{Sig})$, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau $(0,05 \geq \text{Sig})$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Keputusan pengujian:

Terlihat bahwa kolom *Sig* (signifikansi) pada tabel 4.20 coefficients variabel YX ternyata nilai probabilitas *Sig* = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,05 > 0,000$, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

Ha: Pemanfaatan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4.5 Pembahasan hasil penelitian

Pemanfaatan dana desa yang diberikan kepada pemerintah sudah ditentukan oleh pemerintah tentang pemanfaatannya, yakni untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa dana desa yang diberikan kepada setiap pemerintah desa bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan fisik di desa dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, dana desa tersebut membidik dua komponen utama, yakni pembangunan fisik untuk memperlancarkan kegiatan ekonomi dan yang kedua ialah sumber daya manusia masyarakat desa, agar dapat berkompetensi di sektor ekonomi dalam rangka memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*centre of excellent*), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa.

Desa Busato merupakan salah satu desa yang juga menerima dana desa dari pemerintah pusat untuk membantu dalam pembangunan fisik dan sumber daya manusia masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Busato. Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sangat penting karena kedua kegiatan ini sangat berkaitan dengan perkembangan suatu desa. Korten dalam Soetomo (2018) mengatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat atau rakyat. Pendekatan ini menyadari pentingnya potensi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Pembangunan yang memberdayakan masyarakat adalah pembangunan yang memberi ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan dalam menggerakkan dan mengerahkan segala sumber daya (*resources*) yang dimilikinya, baik sumber daya material maupun non material, terutama sumber daya manusianya sendiri untuk mandiri. Dengan kata lain masyarakat mempunyai akses dalam pengambilan keputusan sampai pelaksanaan pembangunan. Model pembangunan yang bertumpuh pada rakyat lebih menekankan kepada pemberdayaan, yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan., sebagaimana dikatakan oleh Sulistiyani

(2014:77) bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni sebesar 0,543 atau 54,3% dan termasuk kategori cukup kuat. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih kurang maksimal, artinya dana desa lebih banyak digunakan oleh pemerintah Desa Busato untuk kegiatan pembangunan fisik desa karena dianggap lebih penting untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Desa Busato.

Hasil penelitian ini sesuai juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Choirur Rijal (2019) yang menyimpulkan bahwa pembangunan masyarakat di Desa Sidoluhur sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidoluhur berjalan begitu masif, hal ini diakibatkan oleh dana desa yang cukup besar yang didapat oleh Desa Sidoluhur. Pembangunan tersebut juga berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Selain itu, pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastruktur yang bersifat untuk memudahkan mobilisasi misal jalan ataupun jembatan. Akan tetapi, pembangunan juga dilaksanakan dalam bidang yang lain, misal dalam bidang pendidikan, ekonomi,

olahraga dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemanfaatan dana desa digunakan secara masif karena dianggap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat memerlukan proses jangka panjang karena memang kegiatan pemberdayaan masyarakat, hasilnya dirasakan nanti dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sesuai dengan pendapat Payne dalam Alfitri (2016:23) yang mengatakan bahwa tujuan dasar pemberdayaan masyarakat adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Memberdayakan masyarakat memerlukan rankaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi politik.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Busato merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa, terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-

sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Tabel 4.21

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Busato Tahun 2022

No.	Jenis kegiatan	Anggaran / biaya
1	Pelatihan UMKM	Rp. 1.000.000
2	Peningkatan hasil panen	Rp. 220.000.000
3	Program edukasi lingkungan di sekolah	Rp. 35.000.000
4	Program kebersihan	Rp. 2.800.000
5	Pos pelayanan terpadu (posyandu)	Rp. 24.000.000
6	Pondok bersalin desa	Rp. 10.000.000
7	Seminar amti narkoba untuk anak sekolah	Rp. 2.500.000
8	Pelatihan IT untuk aparat desa	Rp. 14.000.000
9	Pengenalan cara mengikuti pilkada/pilpres	Rp. 1.500.000
10	Akses teknologi	Rp. 50.000
11	Pembangunan masjid dan tempat ibadah	Rp. 50.000.000
Total		Rp. 360.850.000

Sumber: Kepala Desa Busato

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pemanfaatan dana desa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman sebesar 0,543 atau 54,3%, dan termasuk kategori cukup kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Busato masih lebih fokus pada kegiatan pembangunan fisik dibanding kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa sebagian besar digunakan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik dalam rangka untuk menunjang kegiatan aktivitas perekonomian masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan investasi jangka panjang karena dampaknya akan terasa pada jangka waktu yang tidak singkat, namun dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat secara masif dan menciptakan kemandirian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat desa secara keseluruhan apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang dikategorikan memberdayakan kalau kegiatan pembangunan tersebut memberikan ruang dan peluang yang sama kepada masyarakat desa untuk berperan dalam menggerakkan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya.

5.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yakni:

1. Pemerintah Desa Busato hendaknya memberikan prioritas sama pada kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Pembangunan fisik memang hasil dapat dilihat dan nikmati hasilnya dalam jangka pendek, tapi hanya bersifat sementara karena rusak, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, hasilnya memang tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek, namun hasilnya dapat meningkatkan perekonomian keluarga dalam jangka panjang.
2. Pemerintah desa juga harus lebih aktif dalam bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Busato agar lebih bersinergi dalam membangun desa, serta mencari potensi sumber dalam yang ada di desa untuk peningkatan pendapatan asli desa, seperti lokasi yang dapat dijadikan daerah wisata, kemudian melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang pengembangan daerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2016. Community Development, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Alfabeta. Bandung.
- Ardiyani, Annisa Riva, dkk. 2021, Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 2 Hal 178-189 October 2021.
- Azhari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung). Journal Administrative Reform, 4(2), 137–152
- Ferdinand. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gusmeri, dkk. 2019. Efektifitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Aceh.
- Korten, David C dan Sjahrir. 1992. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor. Jakarta.
- Makmur. 2017. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Revika Aditama. Bandung.
- Mardikanto, Totok . 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Nuha, S. S., dkk. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Diponegoro Law Journal, 6, 1–22.
- Riduwan. 2020. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung. Alfabeta
- Rijal, Choirur Rijal. 2019. Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati).

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sekaran, Uma. 2000. Metodelogi Penelitian. Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian. 2006. Metode Penelitian Survai. LP3ES. Jakarta

Soetomo. 2018. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.

Suhendra. 2016. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta. Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2014. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.

Supranto, 2005. Statistik Teori dan Aplikasi, Cetakan Kedua. Erlangga. Jakarta.

Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

OLAHAN STATISTIK

PEMANFAATAN DANA DESA (variabel X)

Nomor urut warga	1	2	3	4	5	6	Total
1	3	4	3	3	4	3	20
2	3	2	2	3	3	2	15
3	5	4	5	4	4	4	26
4	4	5	4	3	3	4	23
5	3	3	2	3	3	2	16
6	3	2	2	3	2	2	14
7	4	4	5	4	4	4	25
8	3	4	4	4	4	4	23
9	4	5	4	5	5	5	28
10	4	4	3	3	4	3	21
11	2	3	3	2	2	3	15
12	4	3	3	4	3	3	20
13	2	2	2	3	2	2	13
14	3	3	3	2	3	3	17
15	4	4	4	4	4	4	24
16	3	4	4	4	4	4	23
17	5	5	5	5	5	5	30
18	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	3	3	2	17
20	3	3	3	3	3	4	19
21	5	4	4	5	4	5	27
22	4	4	5	4	5	4	26
23	3	4	4	4	4	4	23
24	4	3	4	3	4	3	21
25	4	4	4	5	4	4	25
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	4	3	4	4	4	23
28	3	3	2	3	2	3	16
29	5	4	5	4	5	4	27
30	2	3	3	3	3	2	16
31	3	3	3	3	3	4	19
32	4	4	4	4	4	5	25
33	3	3	3	3	5	3	20
34	4	3	4	4	3	4	22
35	3	3	3	3	4	3	19
36	2	2	2	2	3	3	14
37	4	4	3	4	3	3	21
38	4	3	4	4	4	4	23
39	3	4	3	3	3	3	19

Uji validitas dan reliabilitas variabel X

Scale: All Variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.933	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	17.5897	14.669	.798	.673	.922
VAR00002	17.5897	14.880	.797	.647	.922
VAR00003	17.6410	13.762	.855	.747	.915
VAR00004	17.5641	14.884	.798	.671	.922
VAR00005	17.5128	14.730	.757	.597	.927
VAR00006	17.6154	14.138	.822	.700	.919

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(variabel Y)

Nomor urut warga	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	3	4	3	3	4	3	3	2	25
2	5	3	2	4	3	2	4	2	25
3	5	3	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	3	4	4	5	4	3	32
5	3	4	4	3	3	3	2	2	24
6	3	4	2	3	4	4	3	3	26
7	4	5	4	4	5	4	4	3	33
8	4	5	4	4	5	5	5	3	35
9	4	5	4	4	5	5	5	4	36
10	4	4	4	4	4	3	4	5	32
11	3	3	3	3	3	4	3	3	25
12	4	3	4	3	4	4	3	4	29
13	3	4	4	4	4	3	4	3	29
14	4	3	3	3	3	3	3	3	25
15	4	4	4	4	4	4	4	5	33
16	4	4	5	5	5	5	4	4	36
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	3	3	3	3	3	4	4	3	26
19	3	3	3	4	3	3	3	4	26
20	4	4	3	4	3	4	4	4	30
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	3	3	30
23	4	4	4	4	4	4	4	5	33
24	4	4	4	4	4	4	5	4	33
25	5	5	5	5	5	5	5	4	39
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	5	5	4	4	5	5	5	5	38
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	5	4	5	4	4	5	35
30	3	3	3	3	3	4	4	4	27
31	5	4	4	4	4	4	4	5	34
32	3	4	3	3	4	3	3	3	26
33	4	3	3	3	3	3	3	4	26
34	4	4	4	4	4	3	4	4	31
35	3	3	4	4	4	4	4	4	30
36	3	3	4	3	4	4	3	3	27
37	4	3	4	4	4	4	4	4	31
38	4	4	4	5	5	5	4	4	35
39	4	4	3	4	4	4	4	4	31

Uji validitas dan reliabilitas variabel Y

Scale: All Variables

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	27.0769	16.283	.587	.459	.893
VAR00002	27.1282	16.009	.650	.614	.888
VAR00003	27.2564	15.459	.691	.633	.884
VAR00004	27.1538	15.765	.788	.671	.877
VAR00005	26.9744	15.236	.792	.774	.875
VAR00006	27.0513	15.471	.680	.534	.885
VAR00007	27.1282	15.220	.762	.650	.877
VAR00008	27.2308	15.498	.560	.456	.899

TABEL REKAPITULASI

Nomor urut warga	PEMANFAATAN DANA DESA (variabel X)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (variabel Y)
1	20	25
2	15	25
3	26	32
4	23	32
5	16	24
6	14	26
7	25	33
8	23	35
9	28	36
10	21	32
11	15	25
12	20	29
13	13	29
14	17	25
15	24	33
16	23	36
17	30	40
18	18	26
19	17	26
20	19	30
21	27	32
22	26	30
23	23	33
24	21	33
25	25	39
26	30	40
27	23	38
28	16	32
29	27	35
30	16	27
31	19	34
32	25	26
33	20	26
34	22	31
35	19	30
36	14	27
37	21	31
38	23	35
39	19	31

DISTRIBUSI FREKUENSI:
Frequency Table
PEMANFAATAN DANA DESA
(variabel X)

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	10.3	10.3	10.3
	3.00	16	41.0	41.0	51.3
	4.00	14	35.9	35.9	87.2
	5.00	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	10.3	10.3	10.3
	3.00	15	38.5	38.5	48.7
	4.00	16	41.0	41.0	89.7
	5.00	4	10.3	10.3	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	15.4	15.4	15.4
	3.00	15	38.5	38.5	53.8
	4.00	12	30.8	30.8	84.6
	5.00	6	15.4	15.4	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	7.7	7.7	7.7
	3.00	17	43.6	43.6	51.3
	4.00	14	35.9	35.9	87.2
	5.00	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	10.3	10.3	10.3
	3.00	14	35.9	35.9	46.2
	4.00	15	38.5	38.5	84.6
	5.00	6	15.4	15.4	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	15.4	15.4	15.4
	3.00	13	33.3	33.3	48.7
	4.00	15	38.5	38.5	87.2
	5.00	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

DISTRIBUSI FREKUENSI
Frequency Table
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(variabel Y)

pertanyaan 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	28.2	28.2	28.2
	4.00	20	51.3	51.3	79.5
	5.00	8	20.5	20.5	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	12	30.8	30.8	30.8
	4.00	20	51.3	51.3	82.1
	5.00	7	17.9	17.9	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	5.1	5.1	5.1
	3.00	11	28.2	28.2	33.3
	4.00	21	53.8	53.8	87.2
	5.00	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	11	28.2	28.2	28.2
	4.00	23	59.0	59.0	87.2
	5.00	5	12.8	12.8	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	9	23.1	23.1	23.1
	4.00	20	51.3	51.3	74.4
	5.00	10	25.6	25.6	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.6	2.6	2.6
	3.00	9	23.1	23.1	25.6
	4.00	20	51.3	51.3	76.9
	5.00	9	23.1	23.1	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	2.6	2.6	2.6
	3.00	10	25.6	25.6	28.2
	4.00	21	53.8	53.8	82.1
	5.00	7	17.9	17.9	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

pertanyaan 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	7.7	7.7	7.7
	3.00	11	28.2	28.2	35.9
	4.00	17	43.6	43.6	79.5
	5.00	8	20.5	20.5	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

Regression

Correlations

		Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)	Pemanfaatan dana desa (variabel X)
Pearson Correlation	Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)	1.000	.737
	Pemanfaatan dana desa (variabel X)	.737	1.000
Sig. (1-tailed)	Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)	.	.000
	Pemanfaatan dana desa (variabel X)	.000	.
N	Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)	39	39
	Pemanfaatan dana desa (variabel X)	39	39

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.530	3.07285	1.457

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan dana desa (variabel X)

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	414.630	1	414.630	43.911	.000 ^a
	Residual	349.370	37	9.442		
	Total	764.000	38			

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan dana desa (variabel X)

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.650	2.368		6.608	.000
	Pemanfaatan dana desa (variabel X)	.727	.110	.737	6.627	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (variabel Y)

KUESIONER PENELITIAN

Mohon diisi kolom jawaban dengan memberikan tanda checklist (✓) pada kolom jawaban.

Pertanyaan:

Pemanfaatan dana desa (variabel X)		SI	Sr	KK	Jr	TP
1	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari dana desa tepat waktu					
2	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dana desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa					
3	Perhitungan biaya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secermat mungkin (pembiayaan kegiatan sesuai dengan anggaran dana desa yang dicairkan)					
4	Kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan standarisasi kegiatan (jelas tujuan kegiatan)					
5	Kegiatan pemberdayaan masyarakat mendapat prioritas, termasuk ketepatan dalam memilih langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan					
6	Pemerintah desa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat					

Pemberdayaan masyarakat (variabel Y)		SS	S	RR	KS	TS
1	Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua potensi yang ada dalam diri mereka					
2	Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada orang lain					
3	Masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhannya sendiri untuk disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam rangka pembuatan rencana pembangunan					
4	Masyarakat memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau menghidupkan berjalannya					

	kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka				
5	Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa				
6	Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan, masyarakat memiliki sumber pendapatan ekonomi yang tetap dan menjamin masa depan keluarganya				
7	Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat menyampaikan aspirasi dan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak tertentu				
8	Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi ke depan				

CATATAN:
Skor pertanyaan kuesioner

Selalu (Sl)	= 5
Sering (Sr)	= 4
Kadang-kadang (KK)	= 3
Jarang (Jr)	= 2
Tidak pernah (TP)	= 1



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4712/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Busato

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rifki Mangge
NIM : S2119018
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO
KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN PINOGALUMAN
DESA BUSATO

Jalan Bendungan No 012 Kantor Desa Busato Kode POS 95765

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 145/290/012-DB/SK/IX/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerangkan bahwa ;

Nama Mahasiswa : RIFKI MANGGE

NIM : S2119018

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar-Benar telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 21 September sampai dengan 23 September Tahun 2023 di Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara untuk Penyusunan Proposal Skripsi dengan judul “ ***PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO, KECAMATAN PINOGALUMAN, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA***”

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Busato, 24 September 2023

Kepala Desa Busato



ARIES PRATAMA DAUD



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 226/FISIP-UNISAN/S-BP/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : RIFKI MANGGE
NIM : S2119018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21% berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 20 Oktober 2023
Tim Verifikasi,


Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI. RIFKI MANGGE.doc

AUTHOR

RIFKI MANGGE

WORD COUNT

10029 Words

CHARACTER COUNT

67863 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

275.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 10, 2023 9:04 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 10, 2023 9:05 AM GMT+7

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

ABSTRAK

RIFKI MANGGE. S2119018. PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUSATO KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *survey*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 39 orang, dengan teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman sebesar 0,543 atau 54,3%, dan termasuk kategori cukup kuat. Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Busato masih lebih fokus pada kegiatan pembangunan fisik dibanding kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: pemanfaatan dana desa, pemberdayaan masyarakat



ABSTRACT

**RIFKI MANGGE. S2119018. THE EFFECT OF THE VILLAGE FUND USE
ON THE COMMUNITY EMPOWERMENT AT BUSATO VILLAGE,
PINOGALUMAN SUBDISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW
DISTRICT**

This study aims to find the effect of the village fund use on the community empowerment at Busato Village, Pinogaluman Subdistrict, North Bolaang Mongondow District. It employs a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study covers 39 people with a data analysis technique using simple regression analysis. The results indicate that the village fund use contributes to the community empowerment at Busato Village, Pinogaluman Subdistrict by 0.543 or 54.3% with a Fairly Strong category. It shows that the Busato Village government is still more focused on the physical development activities than the community empowerment.

Keywords: village fund use, community empowerment

